ESAI PENJELASAN PEDOMAN DASAR IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA AMANDEMEN 2021

Amandemen PD IKM FH UI yang diadakan secara luar biasa merupakan sebuah amanah dari PD IKM FH UI itu sendiri yang tercantum dalam apa yang disebut dengan Musyawarah Mahasiswa Luar Biasa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi didalam IKM FH UI dan salah satu forum yang berwenang untuk mengamandemen PD IKM FH UI. Sebelumnya kita semua sudah mengetahui bahwa PD IKM FH UI ini merupakan konstitusi yang mengikat seluruh Anggota IKM FH UI yang merupakan mahasiswa sarjana baik dari program reguler, paralel, dan KKI, namun dalam amandemen ini ada penambahan yakni program studi ekstensi yang disatukan dalam sebuah entitas bernama IKM FH UI.

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa PD IKM FH UI mengamanatkan adanya amandemen setiap orang yang mengajukan dengan usulan salah satu anggota IKM, yang ditujukan agar PD IKM FH UI senantiasa dapat mengikuti perkembangan dunia kemahasiswaan secara mendesak IKM FH UI baik secara kelembagaan maupun secara kemahasiswaan secara luas. PD IKM FH UI yang tidak hanya mengatur perihal fungsi dan wewenang kelembagaan, namun juga perihal Anggota IKM FH UI sendiri baik yang berstatus Aktif maupun Pasif. PD IKM FH UI mengatur secara jelas apa yang dimaksud dengan Anggota Aktif maupun Pasif, seperti apa hak dan kewajibannya, serta tata cara bagaimana seorang Anggota IKM FH UI mendapatkan status aktifnya, semua dijelaskan secara lengkap di dalam PD IKM FH UI.

Tidak perlu berpanjang lebar, disini Tim Perumus Amandemen PD IKM FH UI Tahun 2021 membawa beberapa perubahan signifikan terkait dengan sistem ketatanegaraan di FH UI. Perubahan tersebut mencakup perubahan kekuasaan yudikatif yakni Mahkamah Mahasiswa FH UI yang biasa disebut sebagai MM FH UI berubah yang pada awalnya Hakimnya dipilih oleh Panitia Khusus MM FH UI menjadi Hakim MM FH UI adalah perwakilan dari tiap angkatan. Hal ini sudah dipikirkan matang-matang oleh kami, dimana baik secara dasar kekosongan kekuasaan perlu adanya Perubahan dalam MM FH UI. Selama 3 Tahun belakangan ini Posisi Hakim MM FH UI sudah kosong tidak ada yang menjabat sehingga hal ini menjadi kekosongan kekuasaan yang harus secepatnya diselesaikan, karena sudah dilakukan penjarangan namun tetap tidak ada peminat maka akhirnya diputuskan untuk mengubah struktur Hakim MM FH UI. Hakim MM FH UI bersifat *Ad-Hoc* yang dimana terdiri dari setidaknya-tidaknya 3 orang dari perwakilan angkatan yang dipilih melalui mekanisme Musyawarah Angkatan. Kemudian perubahan kedua yang dilakukan adalah pembentukan BPM yang harus diwakili oleh setidaknya-tidaknya 3 orang Anggota Independen, hal ini untuk menjaga demokrasi dan tata kelola organisasi BPM FH UI. Kemudian Panitia Amandemen ini juga merevisi beberapa salah kata dan penulisan yang sebelumnya terdapat pada draft 2016 seperti pemisahan penulisan FHUI menjadi FH UI, kemudian perbaikan titik koma, kemudian perubahan nomenklatur Peraturan BPM FH UI menjadi Undang-Undang IKM FH UI. hal ini untuk membuat lebih mudah dipahami mengenai peraturan yang berlaku dalam IKM FH UI karena selama ini banyak yang mengira jika Peraturan BPM FH UI hanya berlaku untuk BPM FH UI.

Oleh karena adanya perubahan yang diatas Kami memutuskan untuk menjadi jabatan Hakim MM FH UI *ad-hoc* hal ini karena terjadi kekosongan jabatan dari Hakim MM jika melalui mekanisme sebelumnya, maka kami memutuskan untuk membuat kewajiban dari setiap angkatan untuk setidaknya-tidaknya mengirimkan 1 orang dari setiap angkatannya untuk menjadi Hakim *ad-hoc* MM FH UI yang dipilih melalui mekanisme angkatan. kemudian perubahan signifikan keada adalah perubahan nomenklatur Peraturan BPM FH UI menjadi Undang-Undang IKM FH UI agar lebih mudah dipahami oleh orang banyak dan tidak menimbulkan kerancuan dari IKM itu sendiri karena dari DIM permasalahan disebutkan jika IKM tidak mengetahui jika Peraturan BPM berlaku untuk semua organisasi.

Selebihnya ada perubahan sedikit dari pembukaan PD IKM FH UI yang menghilangkan frasa agen perubahan, yang merupakan staatsfundamentalnorm dari IKM FH UI. Perubahan-perubahan lainnya akan dijelaskan pada alinea-alinea dibawah ini dengan sistem penjelasan pasal per pasal. Pasal yang tidak ada perubahan dapat mengacu pada Esai Penjelasan PD IKM FH UI yang dibuat oleh Tim Perumus PD IKM FH UI Tahun 2016.

PEMBUKAAN

- Penghapusan frasa “agen perubah”

BATANG TUBUH

BAB I - Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Pasal 1

- Adanya Penambahan program studi ekstensi.

Pasal 2

- Perubahan pada frasa “kontribusi nyata” yang terdapat pada huruf b yang diubah menjadi kata “kontribusi” pada ayat.
- Perubahan pada frasa “kontribusi” pada huruf c menjadi “kontribusi”.

Pasal 3

- Tidak ada perubahan.

Pasal 4

- Perubahan pada frasa “ketua panitia” menjadi “ketua pelaksana” pada ayat (1) huruf b.
- Penghapusan kata “anggota” pada frasa “anggota non-pengurus harian” yang terdapat pada ayat (1) huruf c.
- Penambahan pada ayat (1) huruf d yang berisi, “Mengusulkan penyelenggaraan Musyawarah Mahasiswa Luar Biasa yang selanjutnya disebut MUSMA LB.”

Pasal 5

- Terdapat penambahan pada ayat (1) huruf a : atau melanggar ketentuan yang ada di Undang-Undang IKM FH UI; dan/atau
- Terdapat Penambahan ayat-ayat baru yaitu : ayat (2) dan ayat (3)
- Pasal 5A dilebur kedalam Pasal 5 dan berubah menjadi Pasal 5 ayat (3)

Pasal 5 A

- Terdapat penambahan pada ayat (1) huruf a : atau melanggar ketentuan yang ada di Undang-Undang IKM FH UI; dan/atau
- Terdapat Penambahan ayat-ayat baru yaitu : ayat (2) dan ayat (3)
- Pasal 5A dilebur kedalam Pasal 5 dan berubah menjadi Pasal 5 ayat (3)

Pasal 6

- Tidak ada perubahan.

BAB II - BPM FH UI

Pasal 7

- Terdapat penambahan kata lingkup sebelum kata IKM
- Terdapat penambahan ayat pada ayat 2 dan menjadikan ayat (2) sebelumnya menjadi ayat (3)

Pasal 8

- Perubahan pada kata “legislatif” menjadi “legislasi” pada ayat (1).
- Perubahan pada kata “serta” menjadi “dan” pada ayat (3) huruf a.
- Penambahan kalimat “dan BO FH UI melalui Rapat Koordinasi dan Rapat Dengar Pendapat;” yang terdapat pada ayat (3) huruf a.
- Penghapusan huruf c dan d pada ayat (3).
- Penambahan “FH UI” di belakang “PMB” pada ayat (3) huruf e.
- Perubahan kata “mengkoordinasikan” menjadi “mengoordinasikan” pada ayat (4) huruf a.

BAB IIA - MM FH UI

Pasal 8A

- Terdapat penambahan kata “Yang bersifat *ad hoc*”
- Terdapat penambahan kata “lingkup” sebelum kata “IKM”

Pasal 8B

- Terdapat penambahan kalimat “memutus pelanggaran Undang-Undang IKM FH UI” pada huruf e.

Pasal 8C

- Terdapat perubahan pasal ayat 1 dari kata “Hakim MM FH UI yang dipilih...” menjadi “Hakim *ad hoc*”
- Terdapat perubahan total pada ayat 2

Pasal 8D

- Penghapusan frasa “susunan, kedudukan, keanggotaan, dan” pada pasal 8D.

BAB III - BEM FH UI

Pasal 9

- Terdapat perubahan kata “dalam” menjadi “lingkup”

Pasal 10

- Tidak ada perubahan.

Pasal 11

- Tidak ada perubahan.

BAB IV - BO FH UI

Pasal 12

- Tidak ada perubahan.

Pasal 13

- Tidak ada perubahan.

Pasal 14

- Tidak ada perubahan.

Pasal 15

- Tidak ada perubahan.

BAB V - BSO FH UI

Pasal 16

- Tidak ada perubahan.

Pasal 17

- Terdapat penambahan kata “Undang-Undang IKM FH UI dan/atau Peraturan BEM FH UI”

Pasal 18

- Tidak ada perubahan.

Pasal 19

- Tidak ada perubahan.

BAB VI - Sumber Dana

Pasal 20

- Terdapat penghapusan ayat (2) di Pasal 20.

BAB VII - Suksesi Lembaga IKM FH UI dan Pengisian Jabatan

Pasal 21

- Terdapat perubahan ayat (3) dari “1 tahun sekali” menjadi “1 (satu) periode kepengurusan”

Pasal 22

- Tidak ada perubahan.

Pasal 23

- Tidak ada perubahan.

Pasal 24

- Perubahan pada frasa “sekurang-kurangnya 8%” menjadi “sekurang-kurangnya 10%” pada ayat (1).
- Perubahan pada kalimat “Dalam hal tidak ada yang mengajukan diri sebagai calon anggota BPM FHUI” menjadi “Dalam hal tidak terdapat setidaknya 3 (tiga) calon Anggota BPM FH UI” pada ayat (2).

Pasal 24A

- Dihapus

Pasal 25

- Tidak ada perubahan.

Pasal 26

- Tidak ada perubahan.

Pasal 27

- Tidak ada perubahan.

Pasal 28

- Terdapat perubahan menjadi “200 tanda tangan”

Pasal 29

- Perubahan pada ayat (1) huruf c dari “jumlah total tandatangan yang sama pada saat mengajukan diri sebagai calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FHUI” menjadi “jumlah total 200 tanda tangan yang tersebar di 4 (empat) angkatan berbeda.”
- Perubahan pada frasa “maka Badan Pengurus Harian BEM FHUI” menjadi “maka Pengurus Inti BEM FH UI” pada ayat (2).

BAB VIII - Penerimaan Anggota IKM FHUI

Pasal 30

- Tidak ada perubahan.

Pasal 31

- Tidak ada perubahan.

Pasal 32

- Terdapat perubahan “mahasiswa tingkat 4” menjadi “Anggota IKM FH UI”

Pasal 33

- Tidak ada perubahan.

Pasal 34

- Tidak ada perubahan.

Pasal 35

- Tidak ada perubahan.

Pasal 35A

- Tidak ada perubahan.

Pasal 36

- Tidak ada perubahan.

Pasal 37

- Tidak ada perubahan.

BAB IX - Permusyawaratan Mahasiswa

Pasal 38

- Penambahan huruf e yaitu “Musyawarah Angkatan.”

Pasal 39

- Tidak ada perubahan.

Pasal 40

- Tidak ada perubahan.

Pasal 41

- Tidak ada perubahan.

Pasal 42

- Tidak ada perubahan.

Pasal 43

- Tidak ada perubahan.

Pasal 43A

- Perubahan kalimat “Forma LB berbentuk sidang musyawarah yang pelaksanaannya berada dibawah tanggung jawab BPM FHUI” menjadi “Forma LB berbentuk sidang musyawarah yang pelaksanaannya berada dibawah tanggung jawab BPM dan BEM FH UI” pada ayat (2).

Pasal 43B

- Tidak ada perubahan.

Pasal 43C

- Dihapus.

Pasal 43D

- Penambahan pasal dan ayat baru.

Pasal 43E

- Penambahan pasal dan ayat baru.

BAB X - Lambang & Lagu

Pasal 44

- Tidak ada perubahan.

BAB XI - Tata Susunan Peraturan IKM FH UI

Pasal 45

- Tidak ada perubahan.

BAB XII - Aturan Peralihan

Pasal 46

- Dihapus

Pasal 46A

- Penambahan pasal dan ayat baru.

BAB XIII - Penutup

Pasal 46B

- Penambahan pasal dan ayat baru

Pasal 47

- Tidak ada perubahan.

Pasal 48

- Penambahan pasal dan ayat baru